

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KABUPATEN BREBES**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi**

**Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Oleh :**

**ZAKIYA ILFA BARETI**

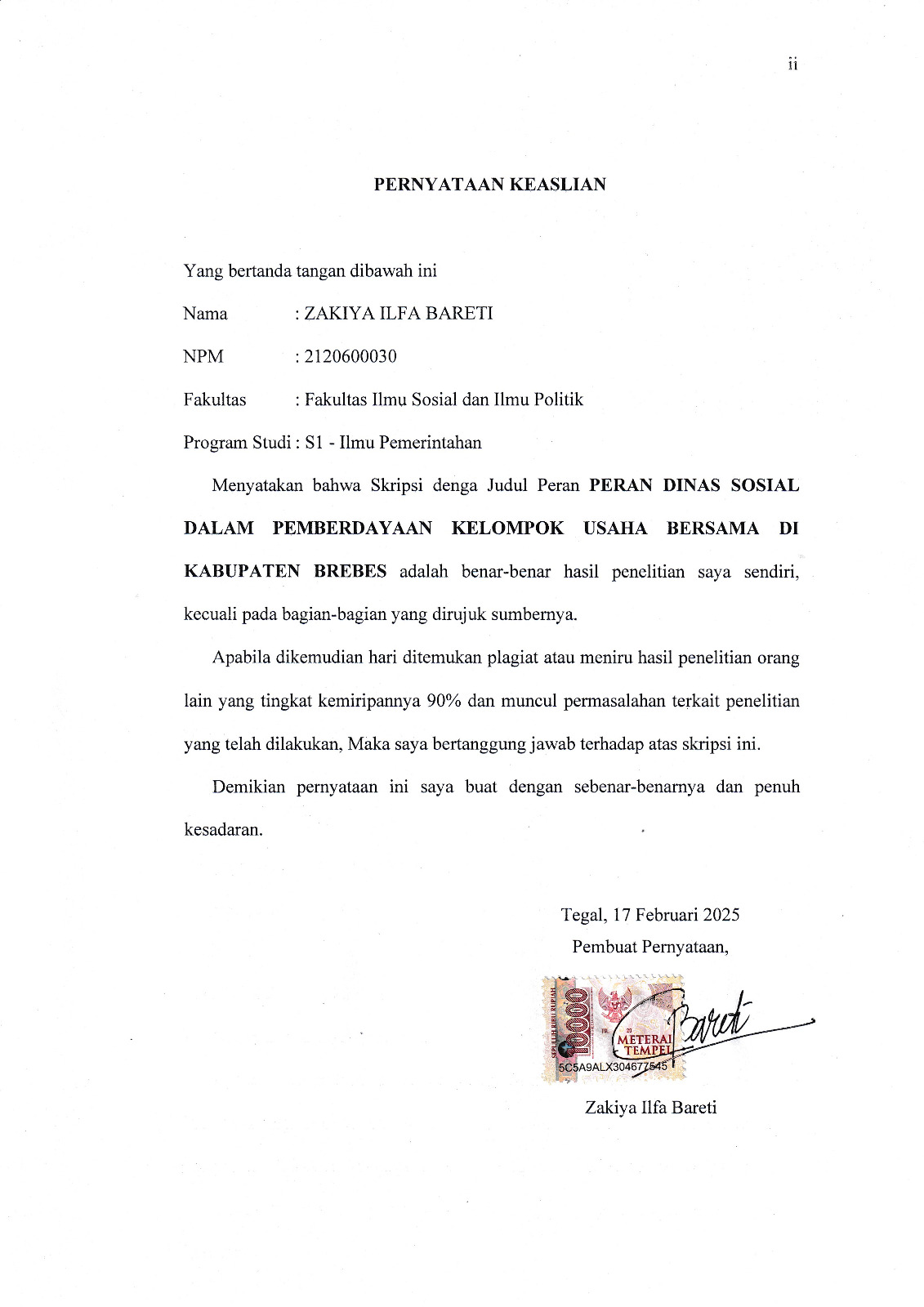
**NIM.** **2120600030**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

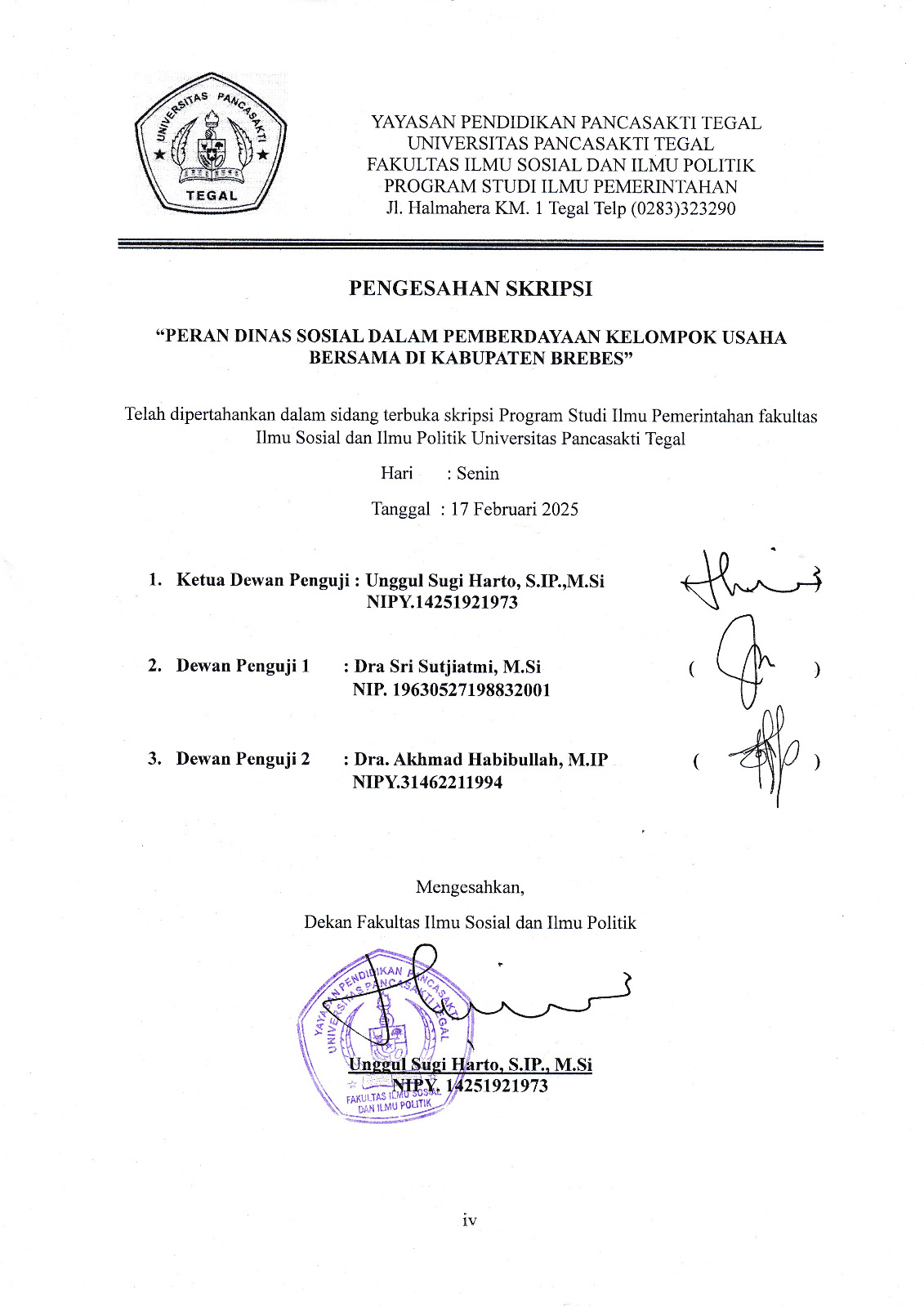
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

****

****

****

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Brebes” skripsi ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah dan syarat kelulusan pada studi Strata-1 (S1) pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang memberikan bimbingan, dorongan dan bantuan. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak/Ibu yang kami hormati:

1. Unggul Sugi Harto, S.IP, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dra. Sri Sutjiatmi, S.IP, M.Si. selaku Dosen pembimbing I yang penuh kesabaran dan selalu ada dalam membimbing peneliti dalam proses penyusunan skripsi dan memberikan pengarahan dari awal hingga selesainya skripsi ini.
3. Akhmad Habibullah, M.IP. selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan serta saran untuk menyempurnakan penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membekali ilmu pengetahuan, semoga ilmu yang pernah diajarkan oleh Bapak Ibu Dosen selama ini semoga akan menjadi ilmu yang bermanfaat.
5. Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah membantu terkait administrasi dan memberikan pelayanan yang baik dan membantu mahasiswa.
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes yang telah mendukung dan memotivasi terselesaikannya Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu yang selalu mendorong, memberi semangat sehingga terselesaikannya kuliah.
8. Sahabat-sahabat saya yang telah membatu memberikan pencerahan dan memotivasi demi terselesaikannya Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keluarga dan masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca kepada penulis agar karya ini dapat bermanfaat.

Tegal, 17 Februari 2025

Zakiya Ilfa Bareti

(Era Fifi Aljanah)

ABSTRAK

**Zakiya Ilfa Bareti. 2120600030. 2025. Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Brebes**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Brebes sebagaimana eraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-19/Pb/2005 yang menyebutkan Kelompok Usaha Bersama merupakan himpunan dari keluarga yang tergolong miskin yang dibentuk oleh masyarakat, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri.

Metode dalam penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Populasi penelitian karyawan Dinas Sosial Kabupaten Brebes dan Ketua Kelompok Usaha. Sampel penelitian berjumlah 20 dengan menggunakan *snowball sampling*. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara.

Dinas Sosial Kabupaten Brebes sebagai salah satu instansi yang bertugas melaksanakan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Brebes, sudah menjalankan program KUBE sebagaimana yang di amanatkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. KUBE yang dijalankan sudah bisa memberikan keberhasilan yang maksimal. Karena banyak KUBE yang berhasil, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarat anggota KUBE itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kekompakan dalam KUBE, adanya inisiatif mengembangkan usaha yang sudah laku di pasaran, dan harga jual produk yang sudah di bilang lumayan.

**Kata Kunci : pemberdayaan, kelompok usaha bersama**

***ABSTRACT***

***Zakiya Ilfa Bareti. 2120600030. 2025. The Role of the Social Service in Empowering Joint Business Groups in Brebes Regency***

*The purpose of this study was to analyze and determine the role of the Social Service in empowering Joint Business Groups in Brebes Regency as regulated by the Director General of Treasury Number Per-19/Pb/2005 which states that Joint Business Groups are a collection of families classified as poor formed by the community, growing and developing on the basis of their own initiative.*

*The method in this study used primary and secondary data. The research population was employees of the Brebes Regency Social Service and Heads of Business Groups. The research sample was 20 using snowball sampling. Data collection for this study used questionnaires and interviews.*

*The Brebes Regency Social Service as one of the agencies tasked with implementing the Joint Business Group (KUBE) program in improving the welfare of the poor in Brebes Regency, has implemented the KUBE program as mandated by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. The KUBE that has been implemented has been able to provide maximum success. Because many KUBEs are successful, so they can improve the welfare of the KUBE members themselves. This can happen because of the solidarity in KUBE, the initiative to develop businesses that are already selling well in the market, and the selling price of products that are already considered quite good.*

***Keywords: empowerment, joint business groups***

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Maka sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras (urusan yang lain). Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap."

**(Q.S Al-Insyirah: 6-8)**

**PERSEMBAHAN :**

Karya Tulis ini peneliti persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya dan keluarga besar saya telah memberikan dukungan serta doa untuk kesuksesan saya sehingga saya merasa semangat dalam penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan masukan dan saran demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

**DAFTAR ISI**

**halaman**

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

LEMBAR PERSETUJUAN iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULAN 1

I.1 Latar Belakang Penelitian 1

I.2 Rumusan Masalah 8

I.3 Tujuan Penelitian 9

I.4 Manfaat Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

II.1 Kerangka Teori 11

II.2 Definisi Konsep 26

II.3 Pokok Penelitian 27

II.4 Alur Pikir 28

BAB III METODE PENELITIAN 29

III.1 Jenis dan Tipe Penelitian 29

III.2 Lokus Penelitian 32

III.3 Jenis dan Sumber Data 32

III.4 Informan Penelitian 33

III.5 Teknik Pengumpulan Data 35

III.6 Teknik dan Analisis Data 37

BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 39

IV.1 Gambaran Umum Kabupaten Brebes 39

IV.2 Visi dan Misi Kabupaten Brebes 41

IV.3 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Brebes 42

IV.4 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Brebes 43

IV.5 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Brebes 44

IV.6 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Brebes 46

BAB V HASIL PENELITIAN 49

V.1 Deskripsi Hasil Penelitian 49

V.2 Meningkatkan Kualitas Hidup Anggota KUBE 50

V.3 Meningkatkan Kemampuan Anggota KUBE dalam Memenuhi

Kebutuhan Hidup Sehari-Hari 60

V.4 Meningkatnya Kemampuan Anggota KUBE dalam Mengatasi

Masalah 68

V.5 Meningkatnya Kemampuan Anggota KUBE Menampilkan Peran

Sosial 71

BAB VI PEMBAHASAN 77

VI.1 Deskripsi Pembahasan 77

BAB VII PENUTUP 80

VII.1 Kesimpulan 80

VII.2 Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN 84

**DAFTAR TABEL**

**Tabel Halaman**

Tabel

1. Indeks Perkembangan Garis Kemiskinan 2013-20244

2. Indeks Garis Kemiskinan Kabupaten Brebes5

3. Informan Dinas Sosial Kabupaten Brebes 34

4. Informan Ketua Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Brebes 34

5. Pedoman Rentang Skala 38

6. Pedoman Rentang Skala Persen 39

7. Data Penduduk Kabupaten Brebes 41

8. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 52

9. Responden Berdasarkan Usia 53

10. Responden Berdasarkan Pendidikan 54

11. Responden Berdasarkan Pekerjaan 55

12. Distribusi Frekuensi Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Kelompok

Usaha 60

13. Distribusi Frekuensi Persentase Peningkatan Keterampilan Kelompok

Usaha 61

14. Distribusi Frekuensi Persentase Kecukupan Dana KUBE 66

15. Distribusi Frekuensi Persentase Kebermanfaatan Dana KUBE 67

16. Distribusi Frekuensi Persentase KUBE Dalam Meningkatkan Produktifitas

dan Pengembangan Usaha 67

17. Distribusi Frekuensi Persentase Keberhasilan Penyelesaian Masalah

Kelompok Usaha Setelah Mengikuti Pelatihan Dari Dinas Sosial 70

18. Distribusi Frekuensi Persentase Motivasi Kelompok KUBE untuk

Mengembangkan Usaha 71

19. Distribusi Frekuensi Persentase Kebermanfaatan KUBE untuk Lingkungan

Sekitar 74

20. Distribusi Frekuensi Persentase Keberhasilan Dinas Sosial 75

21. Distribusi Frekuensi Persentase Kesesuaian Materi Pelatihan 76

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar Halaman**

Gambar

1. Dinas Sosial Kabupaten Brebes 44

2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Brebes 47

3. Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 52

4. Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 53

5. Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 54

6. Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 55

**DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran Halaman**

Gambar

1. Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Dinas Sosial 84

2. Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Ketua KUBE 86

3. Dokumentasi Monitoring KUBE Peternakan 89

4. Dokumentasi Monitoring KUBE Olahan Makanan 90

5. Dokumentasi Monitoring KUBE Konveksi 91

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**I.1 Latar Belakang Penelitian**

Berubahnya peta perekonomian global menempatkan kreatifitas menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan global. Dalam konteks globalisasi, daya saing merupakan kunci utama untuk bisa sukses dan bertahan. Secara umum ekonomi kreatif (*creative economy*) diartikan sebagai suatu konsep perekonomian di era ekonomi baru yang mengidentifikasikan informasi dan kretivitas dengan mengedepankan ide dan berebagai sumber daya manusia itu sendiri, sebagai faktor produksi utama. Menurut *United Nations Conference on Trade and Departement* (UNCTAD) “ekonomi kretif merupakan sebuah konsep ekonomi yang berkembang berdasarkan asset kreatif yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi”. Sehingga konsep ekonomi kretif mengedepankan kretifitas, ide, dan pengetahuan manusia sebagai asset utama dalam menggerakan ekonomi di suatu negara dan akhirnya bisa mendunia. Titik tekan dalam dunia ekonomi kreatif adalah ide, talenta dan kretifitas yang menjadi unsur vitalnya (Wirawan et al., 2022).

Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2018) merumuskan ekonomi kretif sebagai upaya pengembangan ekonomi secara berkelanjutan melalui kretativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki Cadangan sumber daya yang terbarukan. Pengembangan ekonomi kreatif telah diamanatkan melalui Intruksi Presiden No. 6 Tahun 2009.

Presiden mengintruksikan kepada 27 Pemimpin Kementrian dan Badan serta seluruh pimpinan gubernur, bupati, dan walikota Indonesia. Pemimpin mendukung kebijakan pengembangan ekonomi kreatif tahun 2009-2015 yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Secara umum pelaksaan ekonomi kreatif harus melibatkan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam angka kemiskinan di Indonesia hal ini merupakan permasalahan yang terus membayangi pelaksanaan pembangunan yang ada. Kemiskinan ini dapat ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Oleh sebab itu kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta tidak dapat ditunda penanggulangannya. Tujuan dari bidang usaha ekonomi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah pemberian bantuan stimulant untuk menunjang masyarakat yang kurang beruntung, guna meningkatkan ekonomi pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan di bidang sosial maupun keterampilan kepada masyarakat.

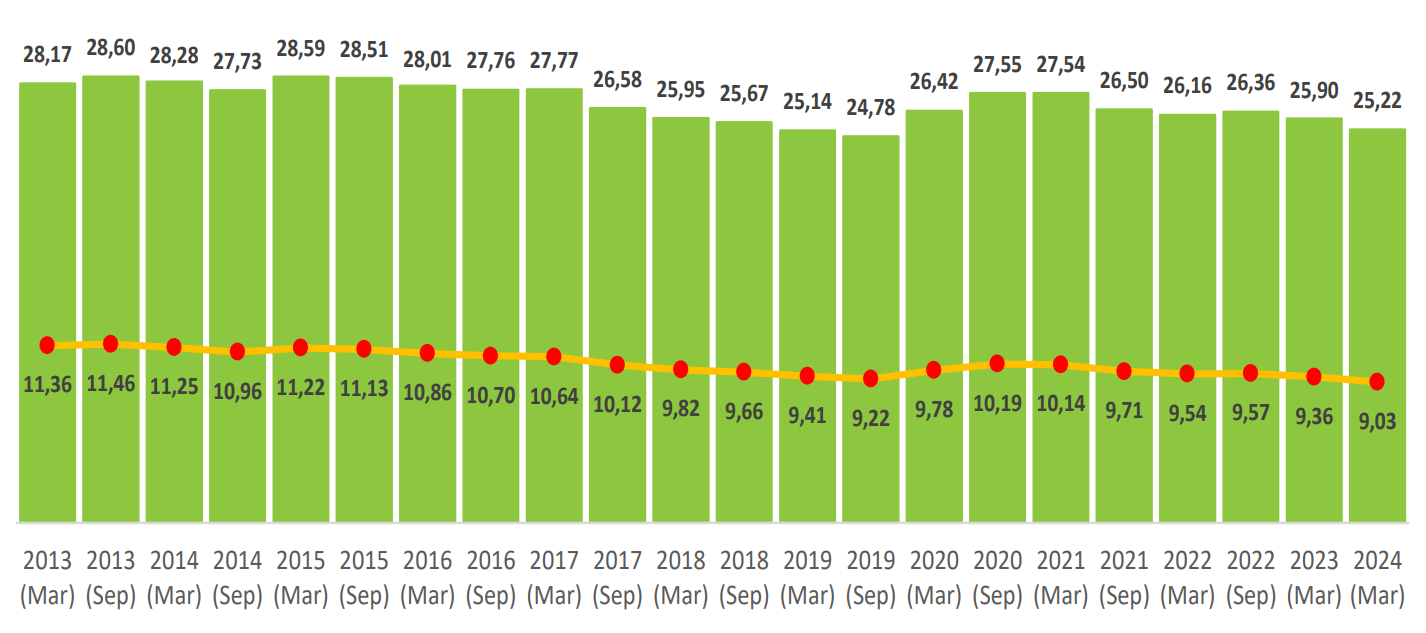
Dalam berbisnis selalu berkaitan dengan perkembangan zaman. Globalisasi salah satunya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara masal yang terjadi didalam globalisasi menyebabkan perubahan cepatnya perubahan dinamika masyarakat secara masal. Pertumbuhan ekonomi nasional ditentukan oleh dinamika dan perkembangan perekonomian, sedangkan perekonomian daerah ditopang oleh kegiatan ekonomi bersakala kecil menengah.

Dinas Sosial sebagai penyelenggara pemerintahan bertanggungjawab atas kelangsungan dan kesejahteraan rakyatnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas. Upaya penanggulangan kemiskinan secara konseptional dapat dilakukan oleh empat jalur strategis yaitu perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan perlindungan sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya pada konteks pemerintahan modern, yang ditandai oleh meningkatnya kedudukan pelayanan dimata masyarakat menjadi suatu hak atas pelayanan (Yashinta, 2020). Fungsi pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai kemajuan bersama (Widiastuti, 2016).

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan terus-menerus dikembangkan untuk menyibak tirai dan misteri kemiskinan ini. Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus- menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh Bangsa Indonesia.

Tabel 1

Indeks Perkembangan Garis Kemiskinan 2013-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2024 jumlah Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 12,22 persen. Dibanding Maret 2023, jumlah penduduk miskin Maret 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,1 juta orang (dari 11,74 juta orang pada Maret 2023 menjadi 11,64 juta orang pada Maret 2024). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,58 juta orang (dari 14,16 juta orang pada Maret 2023 menjadi 13,58 juta orang pada Maret 2024). Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp582.932,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp433.906,00 (74,44 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp149.026,00 (25,56 persen). Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,78 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.786.415,00/rumah tangga miskin/ bulan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2023) angka kemiskinan di Kabupaten Brebes selama 3 tahun berturut-turut yaitu :

Tabel 2

Indeks Garis Kemiskinan Kabupaten Brebes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kemiskinan** | **Tahun** | | |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) | 314,95 | 290,66 | 286,14 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 17,43 | 16,05 | 15,78 |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | 3,04 | 2,73 | 2,98 |
| Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | 0,74 | 0,66 | 0,87 |
| Garis Kemiskinan (Rp/Kapita) | 445.853 | 472.326 | 513.339 |

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Menurut Badan Statistik Kabupaten Brebes mengenai indeks garis kemiskinan pada bulan Maret tahun 2022 sejumlah Rp. 472.326 per kapita per bulan. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 445.853 per kapita per bulan.

Pada bulan Maret 2022 secara presentase penduduk miskin di Brebes mengalami penurunan yaitu dari 17,43 persen pada Maret 2021 menjadi 16,05 persen pada Maret 2022, secara nominal jumlahnya berkurang sebanyak 24,29 ribu orang yaitu 314,95 ribu menjadi 290,66 ribu orang.

Pada periode Maret 2021- Maret 2022, baik indeks kedalaman kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan cukup berarti yang menandakan kualitas penurunan kemiskinan pada periode ini cenderung lebih baik. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2022 sebesar 2,73 atau lebih rendah dibanding tahun 2021 yang mecapai 3,04. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2022 sebesar 0,66 atau lebih rendah dibanding tahun 2021 yang mecapai 0,74.

Pemberdayaan masyarakat miskin merupakan salah satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Upaya pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja antara lain melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan Program Kesejahteraan Sosial (Prokesos) untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses Program Kesejahteraan Sosial (Prokesos) dalam rangka Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK). Melalui pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek namun subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25 tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama pada J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 3, No. 1, Juni 2018: 1 – 124 pasal 1 ayat 1 yaitu Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam ayat 1 pasal 2 juga menjelaskan Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Selanjutnya pada konteks ini diperlukan suatu pemerintahan yang lebih menekankan dan memberikan perhatian penuh pada aspirasi masyarakat. Selain itu juga pemenuhan hak dasar masyarakat (*Civil Society Service*) serta berupaya untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Yakni dengan tetap memperhatikan setiap potensi dan hasil-hasil produksi daerah yang memiliki keunggulan kompetitif (*Competitive Adventive*), serta memiliki nilai jual yang tinggi ditengah persaingan yang semakin kompetitif.

Kabupaten Brebes termasuk wilayah yang terdapat masyarakat fakir miskin sehingga pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Sosial berupaya mensukseskan program dari pusat khususnya dari Kementerian Sosial. Pelayanan serta pemberdayaan dilakukan juga oleh Pemerintah agar masyarakat fakir miskin di Kabupaten Brebes ini segera mendapatkan penghidupan yang layak dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

**I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersamadi Kabupaten Brebes?”

**I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah menggambarkan peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Brebes.

**I.4 Manfaat Penelitian**

* 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan. Khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat tentang Program Ekonomi Kreatif.

* 1. Manfaat Praktis
  2. Bagi Mahasiswa

Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik dan sebagai bahan masukan bagi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di dalam membuat karya ilmiah.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa tentang Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersamadi Kabupaten Brebes.

* 1. Bagi Dinas Sosial

Secara praktis diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi pemikiran dan masukan, serta sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait agar pelaksanaan program Ekonomi Kreatif di Kabupaten Brebes tepatnya di wilayah Kecamatan Brebes berjalan dengan baik sesuai dengan perencaan yang telah di tetapkan.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**II.1 Kerangka Teori**

1. **Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka berfungsi untuk memberikan pemaparan tentang penelitian dan analisis sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti dan untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Sejauh peneliti melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan yang tersedia, judul atau pokok masalah sudah pernah dikaji secara khusus dalam sebuah karya ilmiah. Maka peneliti meninjau penelitian-penelitian terdahulu diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2017) yang berjudul “Peran Pendamping dan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Semarang Tengah.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskrispsikan peran pendamping program keluarga harapan (PKH) dan untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat peran pendamping dalam pendampingan program keluarga harapan (PKH). Penulis juga menyimpulkan bahwa peran pendamping dan Dinas Sosial terbagi menjadi empat diantaranya adalah : 1) Peran dan keterampilan fasilitatif, bahwa pendamping Dinas Sosial telah melakukan perannya sebagai fasilitator dengan membantu informasi, motivasi serta membantu pengorganisasian peserta PKH yang sangat dibutuhkan untuk peserta PKH. 2) Pendamping telah memenuhi perannya sebagai pendidik. Hal yang dilakukan pendamping sebagai pendidik yaitu pada saat pertemuan kelompok Family Development Sessions (FDS).

Pada pendamping di Kecamatan Semarang Tengah juga menemukan kendala-kendala. Faktor Internal yang mnjadi kendala dalam pendampingan adalah sulitnya peserta untuk mengumpulkan berkas dana atu formulir pemutakhiran. Selain itu untuk beradaptadi dengan lingkungan baru pendamping memerlukan waktu. Selain faktor penghambat, ada pula faktor pendukung dalam proses pendampingan meliputi dukungan dari masyarakat penerima bantuan dan ibu-ibu yang rajin hadir. Serta alat bantu pendampingan berupa buku yang berisi materi yang sangat membantu dalam penyampaian *Family Development Sessions* (FDS).

Jheniar Evriliany Akmel (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Efektifitas Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Persfektif Ekonomi Islam”. Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian Analisis Efektifitas Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Persfektif Ekonomi Islam di kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, menunjukkan bahwa kebijakan pendistribusian raskin berhasil apabila 6 indikator kebijakan penentu program raskin dapat terpenuhi dengan baik dan itu akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun dalam pendistribusian beras miskin di lapangan terdapat 4 indikator yang tidak terlaksana dengan baik, yaitu tepat sasaran, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat waktu. Program raskin di Kecamatan Sukarame hanya berfungsi sebagai penekan biaya pengeluaran rumah tangga miskin.

Ahmad Imaduddin (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin Binaan Dinas Sosial Wilayah Kecamatan Samarinda Utara Di Kota Samarinda”. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam tentang Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin, yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan fakir miskin pada Kelompok Usaha Bersama Binaan Dinas Sosial wilayah Kecamatan Samarinda Utara meskipun belum mencapai hasil yang optimal tetapi secara implementatif program tersebut cukup efektif dan berhasil sesuai sasaran terhadap penyaluran dana kepada Kelompok Usaha Bersama di wilayah Kecamatan Samarinda Utara.

Mulia Oktariani (2017) judul penelitian “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung”.Penelitian menggunakan metode Kualitatif. Hasil penelitian menggunakan teknik triangulasi menunjukkan bahwa implementasi program keluarga harapan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di kelurahan Dago, kecamatan Coblong, Kota Bandung belum berhasil. Walaupun serangkaian tahapan berjalan lancar, sumberdaya yang dimiliki meliputi staf, kewenangan, informasi dan fasilitas maupun kemampuan pelaksana (disposisi) program keluarga harapan di kelurahan Dago telah memberikan kontribusi pada pelaksanaan PKH, dan para pelaksana di kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung juga telah menjalankan tugas sesuai dengan *Standard Operational Procedures* (SOP). Namun dalam implementasi program keluarga harapan masih ditemui hambatan antara lain, tidak tersedianya tempat bagi pendamping dalam melakukan pertemuan dengan peserta penerima bantuan, keterbatasan jumlah pendamping yang menangani lebih dari satu kelurahan serta sikap dari penerima bantuan program keluarga harapan itu sendiri.

Oleh karena itu dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi berbagai program bantuan sosial masih belum optimal, masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan baik dari segi kinerja petugas, pengelolaan anggaran, dan masalah yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada jenis program yang dijalankan, disini peneliti mengambil satu program yang sama yaitu porgram KUBE untuk melihat bagaimana keberhasilan implementasinya di daerah lainnya.

Penjelasan penelitian terdahulu penulis paparkan sebagai pembanding untuk penelitian yang dilakukan saat ini sehingga menjadi referensi dan pembanding untuk penulisan penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian yang dipaparkan oleh penulis diatas, penelitian ini membahas peran Dinas Sosial yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi kreatif pada program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk Penanggulanan Kemiskinan di Kabupaten Brebes.

1. **Pemberdayaan Ekonomi Kreatif**

Pemberdayaan menurut Widjaja (2023) adalah upaya meningkatkankemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapatmewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan danmengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, budaya danagama.

Menurut Suharto (2016) pemberdayaan merupakan upaya untukmemandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang merekamiliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompokyang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai berikut pihak yang diberdayakan dan

pihak yang menaruh kepedulian sebagai yang memberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat menurut Zubaedi (2013) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan yang nyata. konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep yakni: konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Upaya pemberdayaan masyarakat perlu di dasari oleh pemahaman bahwa ketidakberdayaan masyarakat akibat tidak memiliki kekuatan (*powerless*). Jim Ife mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimilki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka:

1. Kekuatan atas pilihan pribadi. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik.
2. Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.
3. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik.
4. Kekuatan kelembagaan. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksebilitas masyarkat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, stuktur pemerintahan, media dan sebagainya.
5. Kekuatan sumber daya ekonomi. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktifitas ekonomi.
6. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi.

Menurut Widjaja (2023) Desa yang otonom memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program- program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Apabila otonom desa benar- benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota untuk menyerbu lapangan kerja.

Proses pemberdayaan hendaknya meliputi *enabling* (menciptakan suasana kondusif), *empowering* (penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat), *protecting* (perlindungan dari ketidakadilan), *supporting* (bimbingan dan dukungan), *foresting* (memelihara kondisi yang kondusif tetap seimbang). Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Pemberdayaan dalam Islam adalah bersifat menyeluruh (holistik) menyangkut dalam aspek dan sendi-sendi dasar kehidupan.

Menurut Widjaja (2023) potensi lain yang perlu dikembangkan dan diberdayakan adalah kelembagaan. Kelembagaan yang ada didesa tidak perlu diseragamkan pada setiap desa. Suatu hal yang penting bahwa lembaga social merupakan wadah aspirasi masyarakat yang menjadi pendorong dinamika masyarakat desa. Lembaga- lembaga sosial yanng ada diharapkan tumbuh dan berakar dari bawah dan berkembang sesuai dengan budaya (adat istiadat setempat termasuk didalamnya bagaimana mengelola lembaga-lembaga desa). Pemberdayaan pemerintah desa merupakan langkah penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membantu pengembangan dari masyarakat lemah, renta, miskin, marjinal dan kelompok wanita yang didiskriminasi atau dikesampingkan. Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Menurut Widjaja (2023) pemberdayaan mendukung terwujudnya kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri, yaitu dengan cara :

1. Penataan dan pengembangan desa, kerja sama antar desa dan lembaga adat;
2. Penataan dan pengembangan lembaga dan pemerintahan desa dan paguyuban pemerintahan desa;
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
4. Penataan dan pengembangan pendapatan kekayaan daerah dan keuangan desa;
5. Meningkatkan ketahanan masyarakat;
6. Pemantapan nilai- nilai sosial budaya setempat;
7. Pengembangan usaha ekonomi rakyat;
8. Peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
9. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat terutama dipedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktifitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan stuktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktifitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:

1. Akses terhadap sumber daya;

2. Akses terhadap teknologi;

3. Akses terhadap pasar;

4. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Keempat akses tersebut, disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya, juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat didesa untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan Bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan (Widjaja, 2003: 169)

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya melainkan sampai dengan target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri meskipun dari jauh masih di jaga agar tidak mengalami kegagalan atau jatuh kembali. Sehingga terdapat tahapan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, diantaranya meliputi:

1. Tahap pertama yaitu penyadaran serta pembentukan perilaku kearah perilaku sadar akan perlunya peningkatan kemampuan atau kapasitas diri. Pada tahap ini pihak aktor pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi untuk, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
2. Tahap kedua yaitu transformasi atau menambah kemampuan masyarakat mulai dari pengetahuan, kemampuan, serta ketrampilan agar masyarak bisa memiliki kemampuan dasar sehingga bisa mengambil peran dalam suatau kegiatan pembangunan. Dalam proses ini masyarakat akan mendapatkan proses pembelajaran tentang pengetahuan dan kecakapan-kecakapan ketrampilan yang yang sesuai dengan hal yang menjadi tuntutan bagi kebutuhan mereka.
3. Tahap yang ketiga adalah peningkatan kemampuan berfikir atau intelektual sehingga bisa lebih memiliki ede berupa kreatifitas dan inovasi baru dalam menciptakan sesuatu hal sehingga bisa mengantarkan mereka dalam menuju masyarakat yang madiri dan sejahtera. Dari situ akan muncul kemandirian yang ditandai dengan kemampuan masyarakat didalam membentuk inisiatif melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi dalam lingkungannya.

Dari ketiga tahap pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan disa dilakukan melalui penyadaran terhadap potensi yang dimiliki masyarakat baik itu sumber daya alam maupun dari sumber daya manusianya itu sendiri. Yang selanjutnya pemberian rangsangan kepada masyarakat berupa pembenahan dan sekaligus penambahan ketrampilan guna untuk memberikan posisi masyarakat dalam proses pembangunan perekonomian setelah mereka mendapat itu barulah tahap selanjutnya yaitu pemberian tanggung jawab untuk menuju kerah kemandirian dengan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berfikir menciptakan sesuatu yang baru yang lebih kreatif dan inovatif.

Perkembangan industri kearah industri kreatif berawal dari kesadaran negara-negara maju, bahwa saat ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan supremasi dibidang industri. Akan tetapi, harus lebih mengandalkan SDM yang kreatif, sehingga pada tahun 1990-an dimulailah era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas yang populer disebut sebagai Ekonomi Kreatif. Ekonomi

kreatif ini digerakkan oleh sektor industri yang disebut Industri Kreatif. Ekonomi kreatif yang mencakup industri kreatif, di berbagai negara di dunia saat ini diyakini dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian bangsanya secara signifikan (Sidauruk, 2023).

Begitu pula dengan Indonesia, adanya potensi yang cukup baik dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian negara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan stimulus pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif disetiap provinsi di Indonesia. Terutama pada tahun 2013, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyiapkan anggaran Rp33 miliar untuk mendorong pengembangan usaha kreatif di Indonesia. Beberapa alasan kuat lainnya karena sektor industri kreatif ini memiliki kontribusi dalam menciptakan iklim bisnis yang positif, memperkuat citra & identitas bangsa, mendukung pemanfaatan sumber daya yang terbarukan, merupakan pusat penciptaan inovasi dan pembentukan kreativitas, serta memiliki dampak sosial yang positif (Andri et al., 2015).

Menurut data dari laporan OPUS Ekonomi Kreatif 2020, kontribusi subsektor ekraf pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai Rp1.211 triliun. Torehan angka tersebut membawa Indonesia menduduki posisi ketiga terbesar di dunia, dengan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB. Sedangkan, dua posisi sebelumnya ditempati oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan. Meski menempati posisi ketiga, Indonesia justru lebih unggul dari Amerika Serikat dari segi serapan tenaga kerja pada sektor ekonomi kreatif. Menurut laman Good News From Indonesia pada 2019 sektor ekonomi kreatif Indonesia mampu menyerap hingga 17 juta tenaga kerja (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2021).

Pemberdayaan *(empowering)* merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan *(power).* Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi terlepas dari kebutuhan, potensi atau keinginan orang lain. Sehingga menurut peneliti yang dimaksud pemberdayaan dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan untuk memberikan kekuasaan dan kemampuan kepada masyaralat agar dapat berkembang dengan potensi kreatifitas yang telah dimiliki sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan.

1. **Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama**

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-19/Pb/2005 yang menyebutkan Kelompok Usaha Bersama merupakan himpunan dari keluarga yang tergolong miskin yang dibentuk oleh masyarakat, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, sehingga berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan relasi sosial yang harmonis, dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, memecahkan masalah sosial ekonomi yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama guna meningkatkan kualitas anggota dan kesejahteraan. Kelompok usaha bersama (KUBE) diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu dalam hal ini yang tergolong fakir miskin, dimana tujuan dengan adanya kelompok usaha bersama (KUBE) dapat menciptakan media pemberdayaan dalam rangka mengatasi kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi dan keberfungsian sosial keluarga miskin.

Pemberdayaan masyarakat memberi pandangan menarik mengenai fungsi pemerintahan dengan kata lain memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai tujuan bersama. Salah satu unsur ekonomi kerakyatan adalah usaha ekonomi mikro yang dikelola oleh kelompok usaha kecil terutama bagi mereka yang kurang beruntung baik melalui usaha individu, rumah tangga/keluarga maupun kelompok masyarakat. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan gagasan yang dapat memberikan efek positif pemberdayaan bagi masyarakat kecil dengan meningkatkan kualitas hidup anggota. Program Kelompok Usaha Bersama dilaksanakan langsung di masyarakat dengan pedoman dari pemerintah melalui Dinas Sosial dan sesuai dengan pendidikan nonformal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program keterampilan menciptakan sebuah usaha (Azis, 2020).

Kelompok usaha bersama (KUBE) merupakan media untuk meningkatkan motivasi warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait. Melalui kelompok, setiap keluarga miskin dapat saling berbagi pengalaman, saling berkomunikasi, saling mengenal dan dapat menyelesaikan berbagai masalah dan kebutuhan yang dirasakan. Kemandirian ekonomi masyarakat bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai akademisi pengembangan masyarakat yaitu dengan berfikir dan bertindak untuk menemukan model pemberdayaan masyarakat yang lebih baik (Azis, 2020).

Lokasi yang diteliti bertempat di Kabupaten Brebes dimana pada umumnya bergerak pada bidang peternakan, perikanan, pertanian, industri kecil menengah, dan perdagangan sehingga secara pendapatan masyarakat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tingkat daya beli masyarakat cukup baik. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih ada yang hidup dengan taraf penghasilan rendah dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah, kurang mampu bersaing, dan kurangnya keterampilan yang dimiliki. Oleh karena itu keahlian sangat dibutuhkan oleh masyarakat, agar masyarakat mampu dan mandiri dalam bidang usaha dan dapat berkembang dalam sektor ekonomi. Setiap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Brebes beranggotakan 10 orang, dengan dibentuknya kelompok usaha masyarakat mendapatkan pelatihan dan berbagai pengetahuan mengenai pengolahan pangan sehingga masyarakat dapat mandiri dan mampu memenuhi kebutuhannya. Kemandirian ekonomi masyarakat bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai akademisi pengembangan masyarakat yaitu dengan berfikir dan bertindak untuk menemukan model pemberdayaan masyarakat yang lebih baik.

Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya pada konteks pemberdayaan masyarakat memberi pandangan menarik mengenai fungsi pemerintahan dengan kata lain memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai tujuan bersama. Salah satu unsur ekonomi kerakyatan adalah usaha ekonomi mikro yang dikelola oleh kelompok usaha kecil terutama bagi mereka yang kurang beruntung baik melalui usaha individu, rumah tangga/keluarga maupun kelompok masyarakat. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan gagasan yang dapat memberikan efek positif pemberdayaan bagi masyarakat kecil dengan meningkatkan kualitas hidup anggota.

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dilaksanakan langsung di masyarakat dengan pedoman dari pemerintah melalui Dinas Sosial dan sesuai dengan pendidikan nonformal dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui program keterampilan menciptakan sebuah usaha.

Dinas Sosial Kabupaten Brebes (2024) menyebutkan tujuan dari Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu: 1) Meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam memenuhi Kebutuhan-kebutuhan hidup Sehari-hari ditandai dengan meningkatnya pendapatan keluarga. 2) Meningkatnya kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam mengatasi Masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun lingkungan sekitar nya. 3) Meningkatnya kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam menampilkan Peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial nya. Kegiatan kelompok usaha bersama dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat antara lain pendampingan, pelatihan keterampilan berusaha, pemberian bantuan.

**II.2 Definisi Konsep**

Definisi konsep adalah teori yang digunakan peneliti yang sesuai dengan kriteria obyek peneliti. Maka definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif

Pemberdayaan ekonomi kreatif adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan yang nyata.

1. Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan gagasan yang dapat memberikan efek positif pemberdayaan bagi masyarakat kecil dengan meningkatkan kualitas hidup anggota. Program Kelompok Usaha Bersama dilaksanakan langsung di masyarakat dengan pedoman dari pemerintah melalui Dinas Sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program keterampilan menciptakan sebuah usaha.

**II.3 Pokok-Pokok Penelitian**

Terdapat empat indikator peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan ekonomi kreatif, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas hidup anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
2. Meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Meningkatnya kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam mengatasi masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun lingkungan sekitarnya.
4. Meningkatnya kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam menampilkan peranan sosialnya.

**I.4 Alur Pikir**

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

• UUD 1945 dan Pancasila

• UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

* Permensos RI No. 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial Ekonomi

Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersma

* Permensos RI No. 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama
* Peraturan Dirjen Dayasos Kemesos RI No. 268/DYSPK.5/KPTS/054/2015

Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Brebes

1. Meningkatkan kualitas hidup anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
2. Meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Meningkatnya kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam mengatasi masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun lingkungan sekitarnya.
4. Meningkatnya kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam menampilkan peranan sosialnya.

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

**III.1 Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian merupakan hal penting dalam penelitian karena untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, selain itu dapat meningkatkan kualitas dari penelitian yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kuantitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2019) “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna”.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2019) penelitian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang umum. Metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*) dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini digunakan lebih banyak untuk bidang antropologi budaya; disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. (Sugiyono 2019:8)

Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada Tatar dan individu tersebut secara utuh. Dengan menggunakan metode kualitatif penulis mencari semua data yang dibutuhkan, kemudian dikelompok-kelompokan secara spesifik (Moleong, 2018:4).

Menurut Prastowo (2020:93) metode penelitian kualitatif memiliki enam belas karakteristik, antara lain adalah:

1. Sumber data adalah situasi yang wajar atau *natural setting.*
2. Peneliti sebagai instrument penelitian. Peneliti adalah *key instrument* atau alat penelitian utama.
3. Sangat deskriptif.
4. Mementingkan proses maupun produk, juga memerhatikan bagaimana perkembangan terjadinya sesuatu.
5. Mencari makna di belakang kelakuan atau perbuatan sehingga dapat memahami masalah atau situasi.
6. Mengutamakan dam langsung atau *first hand.*
7. Triangulasi. Maksudnya, data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain. Misalnya, dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya, dan atau dengan metode yang berbeda-beda.
8. Menonjolkan rincian kontekstual.
9. Subjek yang diteliti dipandang berkedudukan sama dengan peneliti sehingga tidak sebagai objek atau yang lebih rendah kedudukannya, tetapi sebagai manusia yang setaraf.
10. Mengutamakan perspektif, maksudnya mementingkan pandangan responder (yaitu bagaimana is memandang dan menafsirkan dunia dari segi pendirinya).
11. Verifikasi, antara iain melalui kasus yang bertentangan atau kasus yang negatif.
12. Contoh yang *proposive*.
13. Menggunakan *audit trail* (melacak untuk mengetahui apakah laporan penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan).
14. Partisipasi tanpa mengganggu. Maksudnya, kehadiran peneliti jangan sampai merusak situasi yang natural atau wajar.
15. Mengadakan analisis sejak awal penelitian dan selanjutnya sepanjang melakukan penelitian tersebut.
16. Desain penelitian tampil dalam proses penelitian.

Selain memiliki karakteristik, metode penelitian kualitatif memiliki sifat khas yaitu penekanan pada lingkungan yang alamiah (*naturalistic setting*), induktif (*inductive*), fleksibel (*flexible*), pengalaman langsung (*direct experience*), kedalaman (*indepth*), proses, menangkap arti, keseluruhan (*wholeness*), partisipasi aktif dari partisipan dan penafsiran (*interpretation*) (Raco, 2020:5).

**III.2 Lokus Penelitian**

Lokus penelitian adalah tempat lokasi penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Brebes Jl. MT. Haryono No.64, Saditan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212.

**III.3 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2019) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Data primer yang digunakan pada penelitian ini berupa kuesioner yang di dapatkan melalui wawancara langsung dengan narasumber.

1. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019) Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan apa yang berkaitan langsung dengan topik penelitian dengan sumber acuan lainnya.

**III.4 Informan Penelitian**

Dalam penelitian survey sosial, subjek penelitian ini adalah manusia, Dalam proses penelitian ini ada yang berpartisipasi secara aktif dan ada yang berpartisipasi hanya secara pasif. (Syaifuddin Azwar, 2021:35)

Menurut Nyoman Kutha Ratna (2010:12) obyek adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya, obyek dalam penelitian kualitatif menurut spradley disebut social situation atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2019:49)

Sejalan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersamadi Kabupaten Brebes maka peneliti akan menggali segala bentuk informasi melalui wawancara khusus kepada beberapa informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, dia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, 2018: 132).

*Key Informan* adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan (Moleong, 2018:3).

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah pejabat dan staf yang terkait dengan penanganan KUBE di Kabupaten Brebes.

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan tetapi bisa tergantung dan tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan.

Informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti (Sugiyono, 2019). Adapun informan yang di maksud dalam penelitian ini adalah 5 orang yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Brebes dan 15 Ketua KUBE yang tersebar di Kabupaten Brebes dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3

Informan Dinas Sosial Kabupaten Brebes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** |
| 1 | Drs. Masfuri, MM | Kepala Dinas |
| 2 | Imam Baehaqi, SH | Sekretaris |
| 3 | Endang Minarsih, SE | Subkor Pemberdayaan Masyarakat & Usaha Mikro |
| 4 | Warudin, A.KS.MM | Subkor Data & Pelaporan |
| 5 | Anggita Widya Rezanti, S.Sos. | Staf |

Sumber : Peneliti (2024)

Tabel 4

Informan Ketua Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Brebes

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA KUBE** | **DESA** | **NAMA KETUA** | **JENIS USAHA** |
| 1 | MULIA JAYA | PLOMPONG | SOIMAH | SEMBAKO |
| 2 | KHAS N'DESO | PANDANSARI | KOYIMAH | KRIPIK KENTANG |
| 3 | BERKAH MAKMUR | KALIJURANG | NOVITA E.S | PENJUALAN BAJU ONLINE |
| 4 | HARAPAN KITA BERSAMA | JAGAPURA | SUHARTI | PRODUKSI TELOR ASIN |
| 5 | CIKANDANG JAYA | CIKANDANG | NANA SUYANAH | OLAHAN BAWANG MERAH |
| 6 | KUBANGWUNGU MANDIRI | KUBANGWUNGU | DANINGSIH | KERIPIK GORENG |
| 7 | LANCAR SEJAHTERA | PADAKATON | UMI KULSUM | BANDENG GEPUK |
| 8 | KULINER PELANGI | MALAHAYU | RISKA APERU | OLAHAN IKAN |
| 9 | KEPOK PEKAUMAN | PEKAUMAN | CARINI | KONVEKSI |
| 10 | MEKAR SARI | PENGABEAN | HASYIM FIRDAUS | PEMBUATAN KRUPUK |
| 11 | LOMBUK PEDAS | TENGKI | JUARNINGSIH | AYAM SAMBEL GEPREK |
| 12 | SEROJA | DUMELING | RASTONI | PENJUALAN ALAT RUMAH TANGGA |
| 13 | SUKSES SELALU | TEGALGANDU | KUSNADI | JAJANAN SNACK |
| 14 | SEJAHTERA | WANATAWANG | EMYATI | WARMINDO |
| 15 | MAJU BERSAMA | SONGGOM | ATUN ISNAINI | KERIPIK |

Sumber : Peneliti (2024)

**III.5 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2019) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utaman dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian, berikut metode yang digunakan:

1. Observasi

Observasi dalam Kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Margono dalam Sugiyono (2019) mengungkapkan bahwa observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejalan yang tampak pada objek penelitian.

1. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung pada responden untuk melengkapi keterangan yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Dalam Teknik pelaksanaannya penulis mengajukan pertanyaan kepada informan, kemudian informan diminta untuk menjawab secara terbuka.

1. Metode Dokumentasi

Metode ini mempergunakan data yang sumbernya dari berbagai dokumen yang telah ada. Hal tersebut dilaksanakan dengan pengumpulan berbagai dokumen yang memiliki relevansi dengan data yang diperlukan berkenaan dengan pemain yang bersangkutan.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka yakni berbagai upaya yang dilaksanakan oleh peneliti dalam mengumpulkan berbagai informasi yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang tengah diteliti. Informasi yang terkumpul bersumber dari literatur yang bentuknya buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

**III.6 Teknik dan Analisis Data**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penulisan ini di analisis menggunakan analisis deskritif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan di deskriptifkan secara menyeluruh. Penulisan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat, sehingga data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya.

Menurut Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2019) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaanyaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari polanya (melalui proses penyuntingan, pernberian kode dan pentabelan).

Reduksi data diartikan sebagai proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan Gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan penngumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

1. Penyajian Data

Setelah data reduksi, maka data disajikan dalam uraian-uraian naratif dan dianalisis dengan analisis prosentase. Penyajian data merupakan upaya penyusunan beberapa informasi yang menjadi sebuah pertanyaan. Dalam data kualitatif disajikan secara bentuk teks yang pada awalnya terpisah menurut sumber informasi kemudian disusun pada saat diperolehnya informasi tersebut.Maka data tersebut diklarifikasikan menurut sesuai pokok-pokok permasalahan yang menjadi pembahasan penelitian.

Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh.

Rekapitulasi hasil dari jawaban responden mengenai Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Brebes, hasil dari perolehan data dari 10 jawaban item pertanyaan terhadap 15 responden, maka selanjutnya direkapitulasi untuk menguji variabel sebelumnya dicari nilai rata-rata rentang skala per item jawaban dalam indikator. Dengan cara sebagai berikut :

Skor Terendah = Bobot Terendah X Jumlah Sampel =

1 X 15 = 15

Skor Tertinggi = Bobot Tertinggi X Jumlah Sampel =

5 X 15 = 75

 Untuk menentukan rentan skala dapat menggunakan rumus :

Rentang Skala (RS) =

(Sumber : Sugiyono,2019:99)

Dimana : n = jumlah sampel,

m = jumlah alternatif tiap jawaban item.

Maka akan menjadi :

RS = = 12

Sehingga akan terbentuklah tabel rentang skala dan persen sebagai berikut:

Tabel 5

Pedoman Rentang Skala

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **RENTANG SKALA** | **KRITERIA** |
| 1 | 67-75 | Sangat Setuju |
| 2 | 54-66 | Setuju |
| 3 | 41-53 | Netral |
| 4 | 28-40 | Tidak Setuju |
| 5 | 15-27 | Sangat Tidak Setuju |

Sumber : Data primer yang telah diolah

Tabel 6

Pedoman Rentang Skala Persen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **RENTANG SKALA** | **KRITERIA** |
| 1 | 80% - 100% | Sangat Setuju |
| 2 | 60% - 79% | Setuju |
| 3 | 40% - 59% | Netral |
| 4 | 20% - 39% | Tidak Setuju |
| 5 | 1% - 19% | Sangat Tidak Setuju |

Sumber : Data primer yang telah diolah

1. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan awal yan bersifat sementara dengan didukung temuan bukti-bukti yang kuat pada pengumpulan data agar Kesimpulan yang ditemukan adalah Kesimpulan yang kredibel.

**BAB IV**

**DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

**IV.1 Gambaran Umum Kabupaten Brebes**

Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Brebes memiliki luas 1.663,39 km². Kabupaten Brebes yang terdiri dari 297 desa dan 17 kecamatan terletak di antara kedua lokasi astronomi tersebut. Secara geografis, Kabupaten Brebes berada di wilayah paling utara Provinsi Jawa Tengah; perbatasannya dengan daerah lain berada di sebelah utara.

Dilihat dari sisi geografis Kabupaten Brebes terletak antara 108'41 - 109'11 Bujur Timur dan antara 6'44 - 7'21 Lintang Selatan. Kabupaten Brebes terletak di wilayah paling barat Provinsi Jawa Tengah. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Banyumas, Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Cirebon, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Letak geografis Kabupaten Brebes menyebabkan iklim curah hujan tinggi dengan rata-rata curah hujan 514 mm dan 28 hari hujan per tahun. Wilayah di Kabupaten Brebes bagian selatan merupakan dataran tinggi. Di sisi lain, wilayah utara merupakan dataran rendah. Dengan ketinggian 875 meter, Kecamatan Sirampog merupakan kecamatan tertinggi. Luas wilayah administrasi tercatat sebesar 166.296 Ha, dengan luas wilayah yang terbesar adalah Kecamatan Bantarkawung, yaitu seluas 20.500 Ha atau 17,65 % dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan.

Secara administrasi, Kabupaten Brebes terbagi dalam terbagi ke dalam 17 Kecamatan yang terdiri dari 292 desa dan 5 kelurahan, 1.132 Dusun, 1.608 Rukun Warga (RW)/ Lingkungan dan 8.274 Rukun Tetangga (RT). Kabupaten Brebes merupakan kabupaten yang paling padat di Provinsi Jawa Tengah. Dengan jumlah penduduk 2.010.617 jiwa, penduduk laki-laki sebesar 1.019.123 jiwa atau 51% dan penduduk perempuan sebesar 991.494 jiwa atau 49%. Beberapa kecamatan di kabupaten Brebes memiliki topografi yang sama, yaitu 5 kecamatan berupa daerah pesisir / pantai, 9 kecamatan dataran rendah, dan 3 kecamatan dataran tinggi atau pegunungan. Terdapat beberapa tipe kelerengan lahan di wilayah kabupaten Brebes, yaitu wilayah datar (0 – 2% ) seluas 71,512,04 ha (hektar), wilayah bergelombang ( 2- 15% ) seluas 30, 641 ha, wilayah curam ( 15- 40% ) seluas 38, 422 ha, dan wilayah sangat curam ( > 40% ) seluas 25, 542 ha. (Pemkab Brebes, 2023)

Berdasarkan kondisi kependudukan Kabupaten Brebes pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah penduduk Kabupaten Brebes dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7

Data Penduduk Kabupaten Brebes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **TAHUN** | **JUMLAH PENDUDUK** |
| 1 | 2021 | 1.992.685 |
| 2 | 2022 | 2.010.617 |
| 3 | 2023 | 2.043.077 |

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Tabel tersebut menjelaskan bahwa meskipun jumlah penduduk Kabupaten Brebes meningkat setiap tahunnya, namun jumlah tersebut masih relatif sama. Kabupaten Brebes sebenarnya memiliki kepadatan penduduk yang tidak merata, dengan beberapa wilayah mempunyai kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibanding yang lainnya.

Kepadatan penduduk masing-masing kecamatan di Kabupaten Brebes bervariasi. Kecamatan Brebes memiliki jumlah penduduk tertinggi sejumlah 189.243 juta penduduk dan Kecamatan Salem memiliki jumlah penduduk terendah sejumlah 65.085 atau setara 300% persen lebih tinggi. Dapat diketahui bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Brebes tidak secara merata. Hal ini dikarenakan pusat pelayanan dan pemerintahan berada di Kecamatan Brebes

**IV.2 Visi dan Misi Kabupaten Brebes**

Visi Kabupaten Brebes “Menuju Brebes Unggul, Sejahtera Dan Berkeadilan”. Misi Kabupaten Brebes: 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan; 2) Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan; 3) Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal; 4) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah; 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri; 6) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak akan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

**IV.3 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Brebes**

Pada tahun 1981 terbentuk Kantor Direktorat Jenderal Transmigrasi (Kanditjentrans) Kabupaten Brebes yang kemudian pada tahun 1985 berubah nama menjadi Kantor Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan (Kandep Trans dan PPH) Kabupaten Brebes dengan Kepala Kantor Bapak J.R. Djokomoeljono. Pada tahun 2001 dengan adanya Otonomi Daerah, Kantor Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambahan Hutan Kabupaten Brebes bersama dengan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes dan Asisten III Sekda Kabupaten Brebes Bidang Kependudukan melebur menjadi Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes dengan Kepala Dinas Ibu Ir. Budi Rahayu.

Perubahan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) baru pada tahun 2009 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes terpecah menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Brebes dengan Kepala Dinas Bapak G. Rohastono Ajie yang sebelumnya Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Brebes.
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Brebes dengan Kepala Dinas Bapak Drs. H. Tarsun, MM. yang sebelumnya Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi (Disdukpilnakertrans) Kabupaten Brebes.

Pada tahun 2001 Bapak Drs. H. Tarsun, MM. memasuki masa pensiun dan digantikan oleh Bapak Ir. Amin Budi Raharjo, M.Pi. Kemudian pada tahun 2013 Bapak Ir. Amin Budi Raharjo dimutasikan menjadi Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes lalu digantikan oleh Bapak H. Syamsul Komar Kaedy, S.Sos. Pada tanggal 4 Januari 2017 berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah , maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes terpecah menjadi 2 (dua), yaitu: 1) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes dengan Kepala Dinas Bapak Drs. Zaenudin, M.Si. 2) Dinas Sosial Kabupaten Brebes dengan Kepala Dinas Bapak Drs. Masfuri, MM.

**IV.4 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Brebes**



Gambar 1

Dinas Sosial Kabupaten Brebes

Sumber : Dinas Sosial (2024)

Visi Dinas Sosial Kabupaten Brebes adalah “Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Sosial Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berkeadilan”. Visi tersebut mengandung makna bahwa sebagai dinas pelayanan di bidang sosial di Kabupaten Brebes mempunyai citacita menjadi dinas yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang sosial ketenagakerjaan dan transmigrasi menjadi betul-betul disa diwujudkan.

Misi Untuk mencapai visi, maka disusunlah beberapa misi sebagai tindakan yang harus dilaksanakan tugas cita-cita tersebutdapat terwujud. Misi Dinas Sosial Kabupaten Brebes adalah:

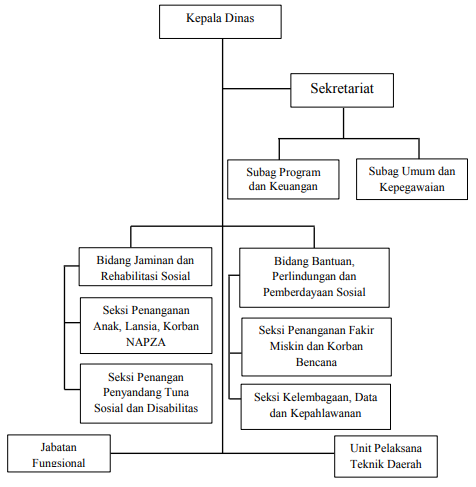
1. Mewujudkan pelayanan sosial yang berkualitas kepada masyarakat.
2. Menumbuhkembangkan peran aktif masyarakat dalam penanganan sosial.
3. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

**IV.5 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Brebes** Dinas Sosial Kabupaten Brebes memiliki tugas yakni untuk membantu Bupati dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yang sudah menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan yang telah diberikan pemerintah kabupaten dalam bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas dinas sosial, mempunyai fungsi diantaranya adalah untuk perumusan suatu kebijakan sesuai dengan lingkup tugas dalam bidang sosial, melaksanakan kebijakan sesuai lingkup tugas dalam bidang sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas dalam bidang sosial, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas dalam bidang sosial, dan pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang telah diberikan oleh Bupati mengenai tugas dan fungsi yang ada dalam bidang sosial (Dinas Sosial Kab Brebes, 2024).

Adapun uraian tugas dinas sosial yakni diantaranya sebagai berikut: merumuskan serta menetapkan program kerja dinas yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dan acuan saat pelaksanaan tugas, merumuskan kebijakan dalam bidang jaminan dan rehabilitasi sosial, bantuan, perlindungan dan pemberdayaan sosial serta penanggulangan kemiskinan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi kebijakan dalam bidang jaminan dan rehabilitasi sosial dan bantuan, perlindungan dan pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dengan lembaga perangkat daerah terkait jajaran pemerintah baik kabupaten,provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan, menyalurkan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan pada prinsip pembagian tugas, menyelenggarakan suatu kebijakan dalam bidang jaminan dan rehabilitasi sosial dengan lembaga perangkat daerah terkait dengan jajaran baik kabupatenmaupun provinsi, melaksanakan kebijakan dalam bidang bantuan, perlindungan dan pemberdayaan sosial dengan lembaga perangkat daerah terkait dengan jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat ataupun diluar kedinasan, mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas melalui pemberian arahan baik tentang perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian, mengawasi pelaksanaan tugas operasional UPT melalui cara mengarahkan pelaksanaan kegiatan, memberikan arahan serta menilai kinerja staff dengan cara mengevaluasi kinerja staff dalam mencapai prestasi kerja, memberikan kritik, saran, serta masukan pada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan, melakukan monitoring, evaluasi kerja, dan laporan pelaksanaan tugas dalam rangka wujud pertanggung jawaban, dan melaksanakan tugas dari kedinasan lain apabila di perintah oleh pimpinan (Dinas Sosial Kab Brebes, 2024)

**IV.6 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Brebes**

Untuk meningkatkan kelancaran tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat, Dinas Sosial mempunyai struktur organisasi berikut:



Gambar 2

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Brebes

Sumber : Dinas Sosial (2024)

Dinas Sosial Kabupaten Brebes mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan di bidang kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial, bantuan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas.
2. Merumuskan kebijakan di bidang jaminan dan rehabilitasi sosial dan bantuan, perlindungan dan pemberdayaan sosial sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
3. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang jaminan rehabilitasi sosial dan bantuan, perlindungan dan pemberdayaan sosial dan bantuan, perlindungan sosial dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten,provinsi,pusat maupun lembaga di luar kedinasan.
4. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis.
5. Menyelenggarakan kebijakan di bidang jaminan dan rehabilitasi sosial dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan.
6. Menyelenggarakan kebijakan di bidang bantuan, perlindungan dan pemberdayaan sosial dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan.
7. Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian.
8. Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
9. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja.
10. Menyampaikan saran dan masukan kepada pemimpin untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Kabupaten Brebes sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang masing-masing jabatan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Lampiran 1.** **Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Dinas Sosial**

**INSTRUMEN PENELITIAN**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**



Nomor Responden :

Hari/Tanggal :

**DAFTAR PERTANYAAN**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA BERSAMADI KABUPATEN BREBES**

Terima kasih dihanturkan kepada Ibu/Bapak atas kerelaan memberikan bantuan jawaban atas kuisioner dan keterangan berikut. Jawaban dan keterangan ini sangat berharga baik bagi peneliti, sebagai data dalam rangka menyusun Skripsi yang diajukan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Oleh karenanya, peneliti berjanji untuk menjaga kerahasiaan dari setiap jawaban dan keterangan Ibu/Bapak. Semoga jasa yang besar dari Ibu/Bapak ini memperoleh imbalan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Aamiin.

1. **Identitas Sosial Responden**

|  |  |
| --- | --- |
| Nama | : |
| Jenis Kelamin | : |
| Umur | : |
| Pendidikan | : |
| Pekerjaan | : |
| Alamat | : |

**II. Kuesioner**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INDIKATOR** | **NO** | **ITEM PERTANYAAN** |
|  |
| Meningkatkan kualitas hidup anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) | 1 | Bagaimana awal mula program KUBE dilaksanakan di Kabupaten Brebes? |  |
| 2 | Darimana sumber informasi yang di dapatkan Masyarakat terkait program KUBE? |  |
| 3 | Dari mana sumber dana untuk bantuan KUBE diberikan? |  |
| 4 | Apa saja jenis KUBE yang ada di Kabupaten Brebes? |  |
| 5 | Apa saja syarat agar dapat bantuan dari program KUBE? |  |
| Meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. | 1 | Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait penerapan program KUBE? |  |
| 2 | Apa manfaat dari penerapan program KUBE dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes? |  |
| 3 | Apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keuntungan kelompok KUBE? |  |
| Meningkatnya kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam mengatasi masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun lingkungan sekitarnya. | 1 | Apa saja permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program KUBE? |  |
| Meningkatnya kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam menampilkan peranan sosialnya. | 1 | Bagaimana peran Dinas Sosial dalam menghadapi permasalahan KUBE yang ada? |  |

**Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Ketua KUBE**

**INSTRUMEN PENELITIAN**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**



Nomor Responden :

Hari/Tanggal :

**DAFTAR PERTANYAAN**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA BERSAMADI KABUPATEN BREBES**

Terima kasih dihanturkan kepada Ibu/Bapak atas kerelaan memberikan bantuan jawaban atas kuisioner dan keterangan berikut. Jawaban dan keterangan ini sangat berharga baik bagi peneliti, sebagai data dalam rangka menyusun Skripsi yang diajukan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Oleh karenanya, peneliti berjanji untuk menjaga kerahasiaan dari setiap jawaban dan keterangan Ibu/Bapak. Semoga jasa yang besar dari Ibu/Bapak ini memperoleh imbalan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Aamiin.

1. **Identitas Sosial Responden**

|  |  |
| --- | --- |
| Nama | : |
| Jenis Kelamin | : |
| Umur | : |
| Pendidikan | : |
| Pekerjaan | : |
| Alamat | : |

**II. Kuesioner**

I**s**ilah kuisioner dibawah ini menurut penilaian anda terhadap penanganan bencana banjir di Kelurahan Limbangan Kulon.

**Keterangan : SS = Sangat Setuju**

**S = Setuju**

**N = Netral**

**TS = Tidak Setuju**

**STS = Sangat Tidak Setuju**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR** | **NO** | **ITEM** | **SKALA PENILAIAN** | | | | |
| **PERTANYAAN** | **SS** | **S** | **N** | **TS** | **STS** |
| Meningkatkan kualitas hidup anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) | 1 | Dengan adanya program ini akan meningkatkan kualitas hidup kelompok usaha |  |  |  |  |  |
| 2 | Dengan adanya program dan pendampingan dari Dinas Sosial ini akan meningkatkan keterampilan saya dan kelompok usaha |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. | 1 | Dana yang diberikan KUBE sesuai dengan kebutuhan |  |  |  |  |  |
| 2 | Dana yang diberikan sangat bermanfaat bagi keberlangsungan usaha |  |  |  |  |  |
| 3 | Program KUBE meningkatkan produktifitas dalam pengembangan usaha |  |  |  |  |  |
| Meningkatnya kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam mengatasi masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun lingkungan sekitarnya. | 1 | Setelah mengikuti pelatihan dari Dinas Sosial saya dan kelompok usaha mampu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah dan cepat |  |  |  |  |  |
| 2 | Dengan adanya pendampingan usaha, saya dan kelompok usaha termotivasi untuk mengembangkan usaha |  |  |  |  |  |
| Meningkatnya kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam menampilkan peranan sosialnya. | 1 | Program KUBE memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar |  |  |  |  |  |
| 2 | Pendampingan yang diberikan oleh Dinas Sosial melalui program KUBE sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha |  |  |  |  |  |
| 3 | Materi pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kelompok usaha sehingga mampu menunjang usaha yang sedang berjalan |  |  |  |  |  |